

SKRIPSI

**Analisis Konflik antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota
Surabaya dalam Penggunaan Mobil PCR di Masa Pandemi Covid-19**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

Indra Nur Ramadhan

I71217057

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI

Saya yang bertanda tangani dibawah ini:

Nama : Indra Nur Ramadhan
NIM : I71217057
Semester : 8
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya saya sendiri, bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila di kemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 28 Juni 2021



Indra Nur Ramadhan

I71217057

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah diperiksa dan disetujui skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Indra Nur Ramadhan

NIM : I71217057

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : Analisis Konflik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan
Pemerintah Kota Surabaya dalam Penggunaan Mobil PCR di Masa Pandemi Covid-19

Surabaya, Juni 2021



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP.197803152003121004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indra Nur Ramadhan dengan judul “**Analisis Konflik antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penggunaan Mobil PCR di Masa Pandemi Covid-19**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 06 Juli 2021.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si
197803152003121004

Penguji II



Moh. Ilyas Rolis, S. Ag., M.SiNIP.
NIP. 197704182011011007

Penguji III



Holillah, S. Ag. M. Si
NIP. 197610182008012008

Penguji IV



Zimamul Khaq, S.Pd. M. Si
NIP. 198212022015031002

Surabaya, 12 Juli 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Prof. Aki Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D NIP :

197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indra Nur Ramadhan
NIM : I71217057
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Politik
E-mail address : indrahmed43@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Analisis Konflik antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya
dalam Penggunaan Mobil PCR di Masa Pandemi Covid-19**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2021

Penulis

(Indra Nur Ramadhan)

Sebenarnya cara pemerintahan Orde Baru pada saat itu tidak ada yang salah, karena untuk membenahi kesalahan saat pemerintahan Orde Lama. Pada saat pemerintahan Orde Baru sistem sentralisasi digunakan ternyata menimbulkan dampak yang besar bagi negara, pada saat itu pemerintahan tetap ingin menjalankan sistem sentralisasi ini untuk pembangunan negara karena pemerintahan menganggap pembangunan negara dapat terlaksana apabila stabilitas politik dan keamanan nasional terjaga dengan baik tetapi dampak nyata yang dirasakan pada masyarakat saat itu suara aspirasi rakyat dibungkam. Dalam prakteknya, pembangunan negara menjadi urusan pemerintahan pusat, suara masyarakat dibungkam, rakyat hanya menjadi objek bukan menjadi partisipasi pembangunan, serta semua perencanaan negara dikelola oleh pemerintahan pusat tanpa adanya pertimbangan dari pemerintahan daerah atau bisa dikatakan pemerintahan daerah hanya sebagai pelengkap sebuah negara.

Rezim Orde Baru yang sudah berjalan selama kurang lebih 30 tahun yang awalnya mustahil untuk dilengserkan tetapi berhasil dibuat tumbang oleh masyarakat Indonesia, hal itu dipicu karena pada tahun 1998 sudah terlalu banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berguna untuk masyarakat dan masyarakat menginginkan perubahan. Karena dalam demokrasi yang sesungguhnya suara rakyat di atas segalanya, hal itulah yang membuat gejolak untuk melengserkan rezim Orde Baru terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Akhirnya, semua perjuangan untuk meraih perubahan dapat dicapai melalui tumbangannya rezim Orde Baru, walaupun dengan menukar banyak korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Daerah-daerah di Indonesia mulai bergerak sedikit demi sedikit untuk mengambil haknya yaitu otonomi daerah yang terdapat pada sistem desentralisasi. Mereka beranggapan bahwa sentralistik tidak mengubah apapun hanya menguntungkan elite pusat

Menurut Fisher, menjelaskan bentuk pola konflik dapat dibagi kedalam tiga bentuk konflik, *Pertama*. Konflik latent, konflik ini berbentuk konflik yang tersembunyi artinya perlu dibahas di publik atau diangkat menjadi bahasan publik untuk dapat diselesaikan secara cepat dan efektif. *Kedua*. Konflik terbuka, konflik ini termasuk konflik yang dalam, artinya mempunyai akar permasalahan yang sangat beragam dan juga akan berakibat timbulnya beberapa efek baru sehingga harus adanya penanganan yang benar dalam mengatasi konflik tersebut. *Ketiga*. Konflik permukaan, konflik ini mempunyai akar permasalahan yang dangkal dan timbul hanya karena salah paham tentang suatu hal dan dapat di selesaikan dengan komunikasi yang baik. Selain itu adanya ruang lingkup pada konflik, Soerjono Soekanto menjelaskan pembagian konflik sosial kedalam lima lingkup khusus, yaitu: a. Konflik lingkup pribadi, yaitu konflik yang melibatkan individu tanpa adanya kelompok yang ikut dalam konflik ini biasanya terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan tujuan ataupun kepentingan. b. Konflik lingkup rasial, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ras satu dengan yang lainnya. c. Konflik lingkup kelas sosial masyarakat, ini termasuk konflik yang timbulnya ketika adanya perbedaan di lingkungan masyarakat terkhusus pada kelas sosialnya sehingga adanya perbedaan kepentingan. d. Konflik lingkup politik, yaitu konflik yang terjadi karena adanya maksud serta kepentingan atau tujuan politik seseorang maupun kelompok. e. Konflik lingkup internasional yaitu konflik yang timbul

akibat adanya perbedaan tujuan yang akan mempengaruhi kedaulatan suatu negara.²⁸

5. Penyebab Konflik

Dasar penyebab terjadinya konflik ialah adanya dua kemajemukan yaitu kemajemukan horizontal lalu kemajemukan vertical. Bentuk dari kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat seperti ras, suku, daerah dan juga agama sedangkan kemajemukan vertical adalah struktur masyarakat berdasarkan kekayaan ataupun pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan kepentingan berdasarkan kemajemukan baik horizontal maupun vertical akan mengakibatkan adanya konflik²⁹

Salah satu bentuk kemajemukan horizontal yang akan menyebabkan sebuah konflik di lingkungan politik seperti adanya kesenjangan untuk kemakmuran suatu daerah pusat negara dengan daerah terpencil suatu negara. Dan salah satu bentuk kemajemukan vertical yang akan sebabkan suatu konflik pada lingkup politik seperti kesenjangan terhadap suatu ekonomi seseorang contohnya orang kaya dengan orang miskin, juga bisa orang berpendidikan tinggi berdebat dengan orang yang berpendidikan rendah.

Soejono Soekanto menjelaskan beberapa penyebab konflik yaitu: a. Karena individu itu sangat beragam maka hal itu menjadi alasan adanya perbedaan pendirian karena setiap manusia itu pasti memiliki pendirian yang berbeda satu sama lain. Sehingga perbedaan inilah yang akan menjadi penyebab konflik

²⁸ Irwandi, "Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)". JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017, hlm 28

²⁹ Denny, "Membaca isu-isu Politik". Yogyakarta: LKIS, 2006. Hlm 17

S.F Marbun berpendapat bahwa kewenangan secara yuridis ialah kemampuan untuk melakukan tindakan sebuah penguasa yang didasari oleh sebuah undang-undang yang berlaku untuk urusan publik.³³ Kewenangan adalah sebuah kekuasaan yang diberikan secara formal kepada orang-orang tertentu di sebuah bidang pemerintahan. Kewenangan juga memiliki hak serta kewajiban.

Saat ini beberapa orang salah dalam menafsirkan kekuasaan dan kewenangan khususnya dalam lingkup ilmu politik. Banyak persepsi bahwa kekuasaan memiliki arti yang sama dengan kewenangan. Kekuasaan memiliki arti adanya pihak yang menerima dan juga ada pihak lainnya yang diperintah.³⁴ Tetapi jika kewenangan menurut Ferrazimen memiliki arti untuk melakukan regulasi, administrasi, serta supervisi atas suatu urusan yang dikerjakan.³⁵ Adapun tambahan secara kontekstual didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 pasal 1 huruf c tentang Kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang berisi “kewenangan pemerintah ialah sebuah hak dan kewajiban kekuasaan pemerintah untuk menentukan sebuah kebijakan untuk bukti penyelenggaraan pemerintah”

Philipus M. Hadjon menjelaskan kewenangan memiliki pengertian yaitu dengan istilah *bevoegdheid*. Dalam konsep hukum Indonesia istilah tersebut ditujukan untuk lingkup hukum publik. Intinya konsep kewenangan merupakan

³³ SF Marbun, “Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik di Indonesia”, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 208

³⁴ Miriam Budiharjo, “Dasar dasar ilmu politik”, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm.35.

³⁵ Ganjong. “Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum”, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2007), hlm.93.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pemilihan penelitian kualitatif ini karena pengumpulan sebuah data pada suatu kondisi yang mempunyai tujuan untuk memaknai sebuah kejadian⁴⁴. Dikatakan kualitatif karena dalam penelitian ini akan menampilkan sebuah hasil data-data secara deskriptif yang berasal dari sebuah kejadian yang dialami oleh seseorang. Penelitian berjenis kualitatif ini mempunyai perbedaan dengan penelitian jenis kuantitatif, perbedaannya ialah tidak adanya sebuah angka, ataupun perhitungan statistik.⁴⁵

Pengertian metode ialah sebuah alat yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah, dan memperoleh suatu penyelesaian masalah. Arti metode juga berisi tentang adanya sebuah “cara” maksudnya proses ketika melakukannya serta alat yang akan digunakan. Sedangkan pengertian metodologi penelitian ialah ilmu atau pengetahuan yang berisi tentang tata cara yang sistematis untuk mengolah suatu data yang ingin dianalisis, disimpulkan, serta dilanjutkan untuk mencari penyelesaiannya.

Desain penelitian ini berbentuk deskriptif. Artinya dalam penulisan penelitian ini penyajian data bersifat verbal yang akan menggambarkan sebuah kejadian. Desain ini memiliki tujuan untuk menjelaskan secara sistematis fakta sosial⁴⁶, khususnya dalam

⁴⁴ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 8

⁴⁵ Sugiono, “Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D”. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 246.

⁴⁶ Iqbal Hasan, “Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya” (Jakarta Ghalia Indonesia) 2002 hlm 20

sebuah dinamika sosial. Melakukan peningkatan terhadap kualitas lingkungan kota Surabaya yang akan mendukung semua sumber daya masyarakatnya. Sektor ekonomi yang juga akan berimbang dengan adanya struktur pengembangan ekonomi di wilayah lokal kota Surabaya yang akan dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Melakukan reformasi birokrasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas, kapasitas, aksesibilitas terhadap pelayanan publik akan menambah semangat partisipasi masyarakat, hal-hal itu yang menjadi focus dalam tantangan Kota Surabaya saat ini.

Menuju Surabaya lebih baik juga merupakan bentuk pesan, maksudnya dikaitkan dengan kondisi Kota Surabaya yang mengalami pengembangan menjadi pusat budaya, politik serta ekonomi, tantangan tersebut menjadi salah satu pesan untuk selalu mengikutii zaman. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kesiapan Kota Surabaya untuk menjawab semua tantangan. Menjawabnya dengan sebuah perkembangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Kota Surabaya, jika dijabarkan mengenai aspirasi masyarakat ialah sebuah kebutuhan, harapan, dan keinginan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu maka kata-kata tersebut digunakan sebagai pengingat bahwa itu sebagai bentuk pesan dari masyarakat Kota Surabaya. Bentuk usaha kita ialah bekerja sekuat tenaga, dengan diimbangi melakukan pemanfaatan terhadap berbagai sumber daya yang di miliki Kota Surabaya untuk mewujudkan Kota Surabaya yang lebih baik. Pemerintahan Kota Surabaya sudah bertekad untuk menanggapi sebuah pesan yang diterima dari sebuah aspirasi lapisan masyarakat guna menuju kondisi Kota Surabaya yang lebih baik dari sebelumnya

Surabaya sebagai kota Jasa dan Perdagangan. Sektor ekonomi di Kota Surabaya juga mengalami pengembangan yang berdasarkan aktivitas karakteristik masyarakat Kota Surabaya sehingga menjadi kota jasa dan perdagangan. Hal itu menjadikan Kota Surabaya sebagai tulang punggung dalam pembangunan yang akan berguna untuk terwujudnya sebuah kesejahteraan secara merata tanpa mengganggu bibit unggul sebuah sumber daya yang lainnya. Urusan perdagangan juga dikhususkan untuk melakukan peningkatan terhadap sebuah produktifitas, yang akan secara otomatis mendorong adanya pertumbuhan terhadap perekonomian yang merata di suatu kota. Sebagai kota yang menginginkan sebuah peningkatan sektor perekonomian baik urusan jasa maupun perdagangan maka dilakukan sebuah peningkatan dalam urusan produktifitas sehingga akan meningkatkan pula sebuah hasil dari segi kualitas yang akan diperdagangkan. Secara langsung maka ekonomi di wilayah Kota Surabaya akan mengalami pertumbuhan yang merata baik di pusat kota ataupun di pinggiran kota.

Surabaya sebagai kota cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan lingkungan, dalam hal ini adanya peningkatan terhadap segi sumber daya manusia serta kualitasnya, yang akan mempengaruhi sebuah peningkatan pembangunan sumber daya manusia tersebut. Peningkatan ini berfokus pada sesuatu yang universal sehingga akan tercipta sebuah peningkatan terhadap emosional dan juga spiritual. Selain itu pada lingkup kesehatan masyarakat, tidak hanya mengurus sebuah Kesehatan jasmani saja, melainkan untuk urusan kesehatan rohani dan mental masyarakat Kota Surabaya.

Geografis provinsi Jawa Timur berada di antara 111⁰ Bujur Timur – 114⁰4' Bujur Timur dan 7⁰ 12' Lintang Selatan – 8⁰48" Lintang Selatan. Mempunyai wilayah dengan luas 47.963 km² yaitu wilayah Jawa Timur dan juga Kepulauan Madura. Daratan Jawa Timur seluas 42.541 km², sedangkan untuk kepulauan Madura memiliki wilayah seluas 5.422 km². Untuk jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 40,67 Juta jiwa.

Provinsi Jawa Timur mempunyai ibukota provinsi yaitu Kota Surabaya. Jawa Timur juga mempunyai 29 Kabupaten dan 9 Kota dan menjadikan wilayah Provinsi Jawa Timur mendapatkan sebutan wilayah Provinsi yang paling banyak mempunyai wilayah Kabupaten dan Kota di negara Indonesia. Struktur Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dimulai dari 11 biro dan juga sekretariat DPRD Jawa Timur, lalu 20 Dinas terkait pelaksanaan pemerintahan daerah.

Jawa Timur mempunyai keunggulan di bagian industri dan juga perdagangan, karena dihimpit oleh daerah yang besar yaitu Provinsi Jawa Tengah dan juga Provinsi Bali. Penduduk di wilayah Jawa Timur mayoritas ialah dari Suku Jawa, Adapun juga suku Madura. Dalam urusan agama mayoritas menganut islam, sebagian kecilnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, maupun Budha.

Adapun kesenian asli dari wilayah Jawa Timur ialah Reog Ponorogo, Tari Remo. Dalam seni teater Jawa Timur mempunyai Ludruk yang dikenal luas sampai mendunia. Tradisi lainnya seperti Karapan Sapi yang berasal dari kebudayaan Madura. Slogan kebanggaan masyarakat Jawa Timur adalah 'Jer Basuki Mawa

Beya” yang memiliki arti jika ingin mencapai sesuatu maka dibutuhkan pengorbanan yang tinggi.⁶⁵

3. Gambaran Umum tentang Penyebaran Pertama Kali Covid-19 di Provinsi Jawa Timur dan di Kota Surabaya

Jika kasus pertama Covid-19 yang ditemukan pada wilayah Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 di daerah Depok, Jawa Barat. Sedangkan Covid-19 ini masuk ke wilayah Provinsi Jawa Timur pertama kali terdeteksi pada tanggal 17 Maret 2020. Sebanyak 6 kasus positif Covid-19 pertama Provinsi Jawa Timur, Seluruh pasien yang positif Virus Covid-19 ini berasal dari Kota Surabaya dan saat itu juga dirawat di Rumah Sakit Unair keenam pasien tersebut.

Sesuai penjelasan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa

“Enam pasien dari Surabaya. Dan kebetulan semua dari enam pasien tersebut dari rumah sakit yang ada di Surabaya juga.”

Setelah enam pasien positif pertama dari kota Surabaya ini langsung merambah ke Kabupaten/Kota lainnya. Tercatat munculnya kluster-kluster Covid-19, seperti kluster pasar, lalu kluster mal hingga kluster keluarga. Salah satu kluster lain yaitu kluster pabrik PT Sampoerna, adapun sebanyak dua karyawan positif Covid-19 pabrik tersebut meninggal dunia pada 14 April 2020.

⁶⁵Pemprov Jatim <http://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-timur#:~:text=Provinsi%20Jawa%20Timur%20secara%20geografis,yang%20meliputi%20dua%20bagian%20utama>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021

Kabupaten Lumajang	27 kasus
Kabupaten Kediri	29 kasus
Kabupaten Jember	14 kasus
Kota Blitar	1 kasus
Kota Batu	5 kasus
Kabupaten Blitar	8 kasus
Kota Kediri	10 kasus
Kabupaten Tulungagung	32 kasus
Kabupaten Banyuwangi	4 kasus
Kabupaten Pamekasan	10 kasus
Kabupaten Jombang	11 kasus
Kabupaten Madiun	13 kasus
Kabupaten Ngawi	6 kasus
Kabupaten Bangkalan	19 kasus
Kabupaten Lamongan	51 kasus
Kabupaten Probolinggo	24 kasus
Kabupaten Sumenep	5 kasus
Kabupaten Pasuruan	40 kasus
Kabupaten Bojonegoro	15 kasus
Kabupaten Nganjuk	14 kasus
Kabupaten Ponorogo	12 kasus
Kota Pasuruan	10 kasus
Kota Probolinggo	10 kasus

Peta sebaran Surabaya confirm Covid-19 pada tanggal 6 Mei 2020

Surabaya Barat	73 orang
Surabaya Pusat	67 orang
Surabaya Timur	213 orang
Surabaya Utara	117 orang
Surabaya Selatan	116 orang

Peta sebaran Surabaya confirm Covid-19 pada tanggal 30 April 2020

Surabaya Barat	61 orang
Surabaya Pusat	58 orang
Surabaya Timur	123 orang
Surabaya Utara	101 orang
Surabaya Selatan	95 orang

Dalam lanjutan penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Timur adanya lonjakan kasus tinggi, ini terjadi di Kota Surabaya pada bulan Juni 2020. Pada peta penyebaran Covid-19 Provinsi Jawa Timur terlihat Kota Surabaya masuk kedalam zona hitam, terbukti pada tanggal 2 Juni 2020 Kota Surabaya memiliki kasus confirm Covid-19 sebanyak 2.748.⁶⁶

⁶⁶ Tim Cek Fakta <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/04/104009665/klarifikasi-penjelasan-zona-hitam-surabaya-bukan-hitam-tetapi-merah-tua?page=all> diakses pada 15 Juni 2021

“Memang pada tanggal 11 Mei 2020 pihak Jatim sudah berkirim surat ke pusat untuk permohonan bantuan mobil PCR terlebih dahulu, lalu kemudian pemkot Surabaya”⁷⁰

Pada tanggal 22 Mei 2020, Risma selaku Walikota Surabaya mengirimkan surat kepada BPBD Jatim Untuk pengajuan permohonan bantuan tes swab mobil PCR sebanyak 2 unit mobil. Dari beberapa pengajuan permohonan tersebut maka Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur membuat jadwal pengoperasian Mobil PCR pada tanggal 27-29 Mei 2020. Dari surat tersebut akhirnya terjadwalkan pada tanggal 27 mei 2020 sebanyak 2 unit bantuan mobil PCR untuk beroperasi di Surabaya, 1 Unit di tempatkan di RS Unair mengerjakan 100 sampel dan pada malam hari dating 1 unit tambahan mobil PCR ditempatkan di RS Asrama Haji. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Joni Wahyuadi selaku Ketua Gugus Kuratif Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim:

“Pada hari pertama penempatan mobil di Unair, karena untuk membantu alat PCR yang sedang mengalami masalah. Lalu ke RSU haji. Selanjutnya ke Sidoarjo karena sudah menunggu, intinya wilayah yang lain juga banyak yang meminta.”⁷¹

Hari kedua yaitu pada tanggal 28 mei 2020, penempatan 1 unit mobil PCR di wilayah Sidoarjo. Sekitar 108 sampel diidentifikasi di RSUD Sidoarjo. Kemudian 1 unit mobil PCR lainnya ditempatkan di RSU Haji untuk melakukan lanjutan identifikasi sampel sisa 90 sampel kemudian bertambah pengerjaan sampel baru sekitar

⁷⁰ Wawancara dengan Kemal Faruq, Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur. Pada tanggal 27 April 2021

⁷¹Faiq Azmi Detik News <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5034152/penjelasan-gugus-tugas-jatim-soal-mobil-pcr-yang-dipertanyakan-risma> diakses pada tanggal 8 Juni 2021

100 sampel, sehingga total pengerjaan di hari kedua itu 190 sampel untuk unit mobil PCR di RSUD Haji.

Lalu di hari ketiga, yaitu pada tanggal 29 Mei 2020, 2 unit bantuan mobil PCR itu ditempatkan di wilayah Tulungagung dan Lamongan. Penempatannya yaitu 1 unit di RSUD Tulungagung yang beroperasi mengerjakan 200 sampel dan di RSUD Lamongan yang mengerjakan 100 sampel sehingga totalnya 300 sampel di hari itu.

Disini konflik mulai terjadi, pihak Walikota Surabaya menyangkan karena mobil yang seharusnya beroperasi di wilayah Kota Surabaya malah dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan. Risma sampai menyatakan bahwa Doni Munardo selaku Ketua Satgas Covid-19 pusat sudah melakukan perjanjian untuk memprioritaskan Kota Surabaya untuk menerima bantuan karena pada saat itu kondisi wilayah Kota Surabaya memiliki jumlah terbanyak positif Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.

“Ini teman-teman lihat saja sendiri ya, saya sudah memohon dengan Pak Doni ini buktinya, jadi saya sendiri yang memohon dengan beliau.”⁷²

Menanggapi hal tersebut pihak Pemerintah Provinsi pun mengklaim bahwa pihak Pemprov yang terlebih dahulu untuk meminta bantuan mobil PCR tersebut. Akhirnya konflik saling klaim pun terjadi pada saat itu. Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19, Suban Wahyudiono yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur pun menjawab

⁷² Tim CNN <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200530075357-20-508157/kronologi-kisruh-mobil-pcr-antara-risma-dan-pemprov-jatim> diakses pada tanggal 8 Juni 2021

yang sama. *Kelima*, Konflik yang dialami oleh organisasi dengan organisasi yang lain. Biasanya bentuk konflik ini terjadi antar negara karena sudah berbeda wilayah kesatuan, seperti konflik perbatasan wilayah.⁸⁶

Adapun beberapa aktor yang terlibat dalam konflik ini yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang meminta bantuan atas mobil PCR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagai Bagian Logistik untuk penanganan Covid-19. Semua Lembaga pemerintahan itu masuk kedalam satu pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Timur

“Sebatas komunikasi saja, karnakan ini bukan konflik yang besar. Kita juga nggak nyangka kok bisa jadi besar seperti di khalayak publik seperti itu. Permasalahan langsung dapat diatasi secara baik-baik kok mas karna ini juga untuk kepentingan bersama.”⁸⁷

Dalam bentuknya konflik penggunaan mobil PCR itu dapat dikatakan konflik interpersonal karena termasuk konflik yang melibatkan banyak pihak dari mulai Pemerintah Kota Surabaya, Gugus Tugas Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun perbedaan kepentingan yang mendasari konflik itu terjadi, mulai perbedaan kepentingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta perbedaan kepentingan dari Pemerintah Kota Surabaya. Konflik ini juga berbentuk bentuk antar kelompok didalam organisasi yang sama, dikatakan sama karena wilayah konflik ini

⁸⁶ Mohamad Muspawi, “MANAJEMEN KONFLIK (UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ORGANISASI)”, Volume 16, Nomor 2 Juli – Desember 2014 hlm 46

⁸⁷ Wawancara dengan Kemal Faruq, Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 April 2021

- Indroharto. 1991, “Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)
- Marbun, SF. 2001, “Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik di Indonesia”, (Yogyakarta: UII Press)
- Mitchell, Bruce. 2010, “Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution. 2003, “Metodologi Research Penelitian Ilmiah”, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Noor, Juliansyah. 2012, “Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah”, (Jakarta: Kencana Penanda Media Group)
- Novri, Susan. 2009, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group)
- Ridwan. 2006, “Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Sanit, Arbi. 1985 “Perwakilan Politik Indonesia”, (Jakarta: CV Rajawali)
- Satori, Djam’an. 2013 Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta)
- Soon, Kang Young. 2007, “Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama”, (Jakarta, UI-Press)
- Sugiono. 2015, “Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D”. (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono. 2016, “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung : Alfabeta)
- Sunarno, Siswanto. 2009 “Hukum Pemerintah Daerah”, (Jakarta: Sinar Grafik).
- Suprayogo, Imam. 2001, “Metodologi Penelitian Sosial Agama”, (Bandung: Remaja Rosda Karya)

- Irwandi. 2017 “ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA” (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”, JISPO VOL. 7 No. 2
- Setyaningsih, Kris. 2017, “Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat”, Jurnal of Islamic Education Management Vol 3 No 1
- Wicaksono, Kristian Widya. 2012 “Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia”. Jurnal Bina Praja Vol. 4 No. 1
- Moleong, Lexy J. 2007 “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Amin, Ali Syamsuddin. 2017 “KOMUNIKASI SEBAGAI PENYEBAB DAN SOLUSI KONFLIK SOSIAL”, Jurnal Common | Volume 1 Nomor 2
- Muspawi, Mohamad. 2014, “MANAJEMEN KONFLIK (UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ORGANISASI)”, Volume 16, Nomor 2
- Prayudi. 2014, “Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Politik Negara di Tengah Hubungan Pusat-Daerah”, Kajian Vol. 19 No.4
- Nuradhawati, Rira. 2014, “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, Jurnal Academia Praja Vol. 2 No. 1
- Wahyuni, Sri “KONFLIK MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PALAKKANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR“,

Wawancara

Wawancara dengan Kemal Faruq, Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 April 2021

Undang-Undang

